

PENGARUH KOMPETENSI, KEBIJAKAN INTERNAL DAN KOMITMEN KEPALA SKPK TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-PURCHASING PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN BIREUEN

Suryani Suryani^{1*)} & Zainuddin Iba²

¹ Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekdakab Bireuen- Aceh

² FEB Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, Aceh

*) email: nanixsuryani84@gmail.com ; zainiba@gmail.com

DOI: 10.55178/idm.v7i13.599

Article history

Received:
Maret 18, 2026

Revised:
Maret 23, 2026

Accepted:
Maret 26, 2026

Page:
65 - 77

Keywords:
*competency,
internal policies,
commitment,
effectiveness of e-
purchasing.*

ABSTRACT: *This study aims to examine the influence of competency, internal policies, and commitment of the Head of the Regional Government Work Unit (SKPK) on the effectiveness of e-purchasing. The study was conducted on SKPK Heads of the Bireuen Regency Government, using a quantitative associative method using path analysis. The results found: (1) competency significantly influences the effectiveness of e-purchasing, with a value of 55.55%. Internal policies have a 46.28% influence. And commitment has a 46.39% influence. (2) Competence, internal policies, and commitment simultaneously contribute positively to the effectiveness of e-purchasing in the Bireuen Regency Government, with a value of 87,6%. (3) There is a causal relationship between the variables of competency, internal policies, and commitment, with an average value of 5.5%.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh kompetensi, kebijakan internal, dan komitmen Kepala SKPK terhadap efektivitas penggunaan *E-purchasing*. Penelitian dilakukan pada Kepala SKPK Pemerintah Kabupaten Bireuen, dengan metode asosiatif kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur. Hasilnya ditemukan, (1) faktor kompetensi berpengaruh signifikan pada efektivitas penggunaan *e-purchasing* sebesar 55,55%. Kebijakan internal berpengaruh sebesar 46,28%. Dan komitmen berpengaruh sebesar 46,39%. (2) Secara simultan kompetensi, kebijakan internal dan komitmen memberi kontribusi positif pada efektivitas penggunaan *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar 87,6%. (3) Terdapat hubungan kausal antar variabel kompetensi, kebijakan internal dan komitmen, rata-rata dengan kategori cukup kuat.

Pendahuluan (Introduction)

Di era globalisasi sekarang ini, dimana sebuah persaingan menjadi semakin kompetitif, sehingga sangat penting bagi suatu organisasi untuk selalu melakukan perubahan dalam memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi sebagai pelaku yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan-perubahan tersebut guna meningkatkan kinerja organisasinya. Perubahan pada suatu organisasi bukanlah sebuah proses yang sederhana, karena perubahan organisasional menyangkut mengenai mengubah kinerja dari organisasi itu sendiri. Menurut Sedarmayanti (2017) selain melakukan perubahan organisasi untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia, terdapat faktor lain yang harus diperhatikan oleh sebuah organisasi yaitu faktor kompetensi yang dimiliki pegawainya, karena kompetensi pegawai merupakan faktor

kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan kinerja yang baik. Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang harus ada pada diri seorang pegawai untuk dapat melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perubahan pada sistem pengadaan barang/jasa yang mulai dilaksanakan pada tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Perubahan pengadaan barang/jasa pemerintah didorong oleh 3 faktor, salah satunya adalah masalah kinerja dari para aparatur yang bekerja di Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1) proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terkesan tertutup dan sangat sulit di akses oleh publik. Hal ini menimbulkan kecurigaan seperti terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa; 2) tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada khalayak umum; 3) kurangnya kapasitas manajemen pengadaan oleh instansi pemerintah dari aspek pengorganisasian maupun jumlah dan kompetensi personelnnya (LKPP; 2009).

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, dari metode konvensional (manual) menuju metode elektronik (*e-procurement*), dengan *e-purchasing* sebagai salah satu ujung tombak. *E-purchasing* melalui *e-catalogue* diharapkan mampu menciptakan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam pengadaan. Kebijakan ini didorong oleh kompetensi pusat (seperti Perpres No. 12 Tahun 2021) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas anggaran.

Menurut Wibowo (2017) kompetensi merupakan karaktersitik yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. Selain itu, kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya adalah kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi baru dan meningkatkan manfaat yang telah disepakati.

Meskipun secara sistem teknis *e-purchasing* sudah dirancang dengan baik, implementasinya di lapangan sering kali menemui kendala. Penggunaan *e-purchasing* yang efektif tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal organisasi. Kebijakan internal, yang mencakup komitmen pimpinan, SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas, kapasitas SDM, dan budaya organisasi, sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan.

Mengingat pentingnya tujuan dari pengadaan dan kerugian yang diterima akibat adanya kecurangan tersebut, maka perlu adanya pembenahan sistem yang mendasar, selain dari sisi aturan dan kompetensi, dari sisi pelaksanaan pengadaan di Indonesia juga perlu diperbaiki dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik. (Tarigan, 2019). *E-procurement* adalah otomatisasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi web (Nawi *et al.*, 2016). Proses otomatisasi diharapkan dapat mengurangi intervensi manusia dengan seminimal mungkin di dalam sistem untuk bisa mengedepankan prinsip transparan dengan bantuan *internet* (Nurmandi, 2015).

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam *e-purchasing* adalah masih adanya keengganan pengguna (SDM) untuk beralih sepenuhnya ke sistem *online*, kurangnya pemahaman mengenai kompetensi terbaru, dan lemahnya pengawasan internal. Tanpa adanya kebijakan internal yang mendukung, *e-purchasing* hanya menjadi formalitas. Oleh karena itu, penelitian mengenai bagaimana kebijakan internal (komitmen manajemen, tata kelola, dan kebijakan SDM) memengaruhi efektivitas *e-purchasing* menjadi sangat krusial untuk dipelajari.

E-purchasing diharapkan dapat menghilangkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) karena setiap langkah proses dapat dilacak dan diaudit. Namun, dalam implementasinya, efektivitas *e-purchasing* masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti ketaidaksiapan sistem, kompetensi sumber daya manusia (SDM), hingga komitmen pengguna (*user*) dan organisasi.

Komitmen organisasi dan individu (PPK/Pejabat Pengadaan) memegang peranan penting dalam keberhasilan penerapan sistem teknologi informasi. Meskipun sistem *e-purchasing* telah dirancang canggih, tanpa adanya komitmen yang kuat dari pengguna untuk beralih dari metode konvensional ke metode elektronik, efektivitas penggunaan *e-purchasing* tidak akan tercapai optimal. Fenomena yang sering terjadi adalah masih adanya ketakutan atau keengganan pengguna untuk menggunakan sistem baru, yang memicu lambatnya adopsi *e-purchasing*.

Berdasarkan studi sebelumnya, komitmen organisasi terbukti memoderasi penerapan *e-procurement*. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat lebih dalam pengaruh komitmen pengguna terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* di Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

Permasalahan kebijakan internal pada Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam *e-procurement* (pengadaan barang/jasa elektronik) umumnya berkisar pada ketidaksiapan organisasi, prosedur yang tidak sinkron, dan kendala sumber daya manusia. Meskipun secara teknis sistem *e-procurement* (seperti SPSE LKPP) sudah mumpuni, kebijakan internal di tingkat instansi sering kali menjadi penghambat efektivitasnya. Selanjutnya permasalahan komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam *e-procurement* (pengadaan elektronik) adalah salah satu hambatan utama yang menyebabkan implementasi sistem tidak berjalan optimal, meskipun teknologi tersebut menawarkan efisiensi dan transparansi. Komitmen ini mencakup komitmen pimpinan (*top management*) dan komitmen pengguna (staf/pegawai). Permasalahan lain diketahui seringnya perubahan pejabat pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemerintah Kabupaten Bireuen membuat mereka kurang *update* terkait aturan dan teknis terbaru dalam *e-purchasing*.

Tinjauan Literatur (*Literature Review*)

Beberapa faktor fundamental yang diduga mempengaruhi efektivitas kerja dalam lingkungan birokrasi adalah:

1. Kompetensi Pegawai/SDM: Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mumpuni sangat penting untuk melaksanakan tugas-tugas teknis dan manajerial. Kurangnya kompetensi ASN sering menjadi kendala utama dalam pencapaian target kinerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan kompetensi kerja ialah kemampuan kerja yang meliputi pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan didalam setiap individu). Edison (2020) menyatakan kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap.

Michael Zwell (Wibowo, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu a) Keyakinan dan nilai-nilai, b) Keterampilan, c) Pengalaman, d) Karakteristik kepribadian, e) Motivasi, f) Isu emosional, g) Kemampuan intelektual dan i) Budaya organisasi.

2. Kebijakan Internal: Sistem pengendalian internal, standar operasional prosedur (SOP), dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan kebijakan internal yang menentukan kelancaran operasional. Sistem yang lemah menyebabkan ketidakefektifan operasional.

Menurut Effendi (2018) kebijakan internal adalah rangkaian konsep, asas, dan aturan tertulis yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk mengarahkan perilaku pegawai, mengatur prosedur kerja, serta mengelola sumber daya organisasi guna mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman pengambilan keputusan rutin agar tercipta konsistensi dan efisiensi operasional.

Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Sesuai dengan sistem Administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. (2) Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum.

Sedangkan Federick (Agustino, 2016) bahwa: “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Effendi (2018) dimensi dan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan internal adalah: (1) Dimensi Kebijakan SDM (*Human Resources Policies*), (2) Dimensi Kebijakan Operasional (*Operational Policies*), (3) Dimensi Kebijakan Perilaku dan Disiplin (*Conduct Policies*), (4) Dimensi Kebijakan K3 dan Lingkungan (*Safety & Environment Policies*),

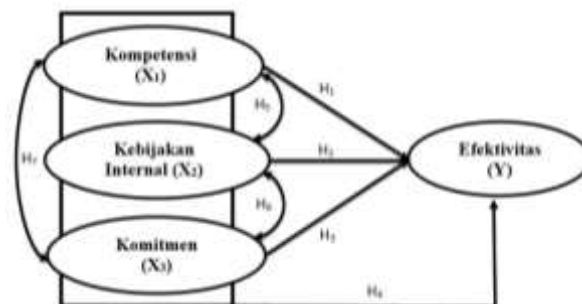
3. Komitmen Kepala SKPK: Komitmen pimpinan (kepala dinas/badan) memiliki peran krusial dalam menciptakan budaya organisasi yang berkinerja tinggi. Komitmen yang rendah dari kepala SKPK akan mengakibatkan kurangnya arahan strategis dan rendahnya motivasi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi.

Komitmen organisasional merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas dari pegawai dan merupakan sebuah proses berkelanjutan tentang bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya pada kesuksesan dan kebaikan organisasi yang dijalaninya (Luthans dalam Siswanto dkk, 2022).

Madiistriyatno dan Hadiwijaya (2020) mengatakan bahwa komitmen organisasi merupakan hubungan individu dengan organisasinya yang berhubungan dengan kesetiaan, kepercayaan dan loyalitas dimiliki pegawai terhadap organisasinya. Sedang Donni (Norawati dan Fahraini, 2022) menyatakan merupakan bentuk loyalitas pegawai terhadap organisasinya yang ditunjukkan melalui keaktifan dan keterlibatan pegawai tersebut yang tinggi demi tujuan organisasi yang ingin dicapai.

Jadi komitmen merupakan sebuah cerminan seseorang dalam mengenali sebuah organisasi atau perusahaan dengan terikat terhadap berbagai tujuan (Kreitner dan Kinicki dalam Zusrony, 2021).

Kerangka penelitian ini menggambarkan hubungan faktor-faktor yang diteliti dan hubungan diantaranya yang membentuk model jalur dengan struktur berikut;



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Metode Penelitian (Methodology)

a). Metode dan Obyek Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Penelitian dengan desain survei menggunakan instrumen kuesioner. Dan adanya dugaan hubungan kausal antar variabel independen yang mempengaruhi langsung dan tidak langsung pada variabel dependen sehingga diterapkan asosiatif (Marwan *et al.*, 2023).

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2026. Peneliti mengamati dengan observasi untuk menemukan permasalahan yang dihadapi mengenai pengaruh kompetensi, kebijakan internal dan komitmen kepala SKPK terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

b). Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Kepala SKPK pada Pemerintah Kabupaten sebanyak 51 orang. Karena keterbatasan unit penelitian, semua Kepala SKPK dijadikan responden (sampel jenuh).

c). Variabel

Variabel penelitian terdiri atas tiga variabel eksogen dan satu variabel endogen yang didefinisikan berikut ini:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi Konsep	Dimensi
Kompetensi (X ₁)	Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap. Edison (2020)	• Pengetahuan • Keahlian • Sikap
Kebijakan Internal (X ₂)	Kebijakan internal adalah rangkaian konsep, asas, dan aturan tertulis yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk mengarahkan perilaku pegawai, mengatur prosedur kerja, serta mengelola sumber daya organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Marwan Effendi (2018)	• Kebijakan SDM (<i>Human Resources Policies</i>) • Kebijakan Operasional (<i>Operational Policies</i>) • Kebijakan Perilaku dan Disiplin (<i>Conduct Policies</i>) • Kebijakan K3 dan Lingkungan (<i>Safety & Environment Policies</i>)
Komitmen (X ₃)	Komitmen adalah sebuah pemicu bagi pegawai untuk mencapai kesuksesan bahkan ketika pegawai tersebut mengalami berbagai masalah pada pekerjaannya sehingga pegawai tersebut dapat memiliki komitmen dan menganggapnya sebagai sebuah tantangan dan akan selalu memiliki cara untuk menyelesaikannya. Anggraeni dan Rahardja (Zusrony, 2021)	• komitmen afektif (<i>Affective Commitment</i>) • komitmen kontinyu (<i>Continue Commitment</i>) • komitmen normatif (<i>Normative Commitment</i>)
Efektifitas Kerja (Y)	Efektivitas kerja adalah kemampuan suatu organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Efektivitas kerja juga dapat dipandang sebagai ukuran seberapa jauh suatu organisasi, program, atau aktivitas berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Richard M. Steers (2018)	• Kemampuan menyesuaikan diri • Prestasi kerja • Kepuasan kerja

d). Analisis Data

Digunakan model *path analysis*, yakni teknik statistik untuk menguji hubungan kausal (sebab-akibat) antar variabel dalam penelitian asosiatif kuantitatif, khususnya pengaruh langsung dan tidak langsung variabel independen terhadap dependen melalui variabel intervening. Analisis ini memodelkan diagram jalur berdasarkan persamaan struktural untuk memahami kompleksitas pengaruh antar variabel, dan mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya baik pengaruh langsung maupun tidak langsung (Marwan *et al.* 2025).

Dalam menerapkan model analisis ini, dipenuhi semua syarat, termasuk asumsi klasik model dan antar variabel eksogen terdapat kausalitas.

Hasil dan Pembahasan (*Results and Discussion*)

1) Hasil Penelitian

(a) Deskripsi

Data tentang jumlah jawaban responden setiap variabel ditunjukkan dalam tabel 2 sehingga dapat dihitung skor pencapaian dari setiap variabel.

Tabel 2. Deskripsi Pegawai Tentang Variabel

Variabel	Jumlah dan Persentase Jawaban Setiap Pilihan				
	(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)
Kompetensi	-	8	85	193	135
Jumlah Skor Penelitian = 1684					
Jumlah Skor Ideal = skor 5 x 8 butir kuisisioner x 51 responden = 2040					
Persentase Pencapaian Kompetensi = 82,54%					

Kebijakan Internal	-	6	55	309	249
Jumlah Skor Penelitian = 2476					
Jumlah Skor Ideal = skor 5 x 12 butir kuisioner x 51 responden = 3060					
Persentase Pencapaian Kebijakan Internal = 80,90%					
Komitmen	-	1	73	136	109
Jumlah Skor Penelitian = 1276					
Jumlah Skor Ideal = skor 5 x 6 butir kuisioner x 51 responden = 1530					
Persentase Pencapaian Komitmen = 83,39%					
Efektivitas	-	4	57	139	119
Jumlah Skor Penelitian = 1276					
Jumlah Skor Ideal = skor 5 x 6 butir kuisioner x 51 responden = 1530					
Persentase Pencapaian Efektivitas = 83,39%					

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Variabel kompetensi menurut persepsi Kepala SKPK pencapaiannya sebesar 82,54% hal ini masuk kategori sangat baik.
- Variabel kebijakan internal menurut persepsi Kepala SKPK, mencapai 80,90%, walaupun masih bisa dan harus ditingkatkan lagi.
- Variabel komitmen menurut Kepala SKPK diketahui pencapaiannya sebesar 83,39%, hal ini dianggap sangat baik.
- Variabel efektivitas menurut Kepala SKPK diketahui pencapaiannya sebesar 83,39%, hal ini dianggap sangat baik.

(b) Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dari hasil perhitungan uji validitas variabel dengan SPSS, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Uji Validitas Instrumen

Kompetensi (X₁)					
Butir	Pernyataan	r-hitung	r-min	Sig. Uji	Ket
1	Saya mengetahui alur penggunaan <i>e-katalog</i> Nasional/ Lokal untuk melakukan pembelian barang /jasa	0,439	0,300	0,000	Valid
2	Saya memahami perbedaan antara <i>e-purchasing</i> (katalog elektronik) dengan belanja langsung secara manual	0,675	0,300	0,000	Valid
3	Saya memahami regulasi terbaru mengenai kewajiban penggunaan <i>e-purchasing</i>	0,607	0,300	0,000	Valid
4	Saya mampu mengakses dan menavigasi aplikasi <i>e-katalog/SPSE</i> tanpa kendala teknis	0,428	0,300	0,000	Valid
5	Saya memahami alur proses <i>e-purchasing</i> dari pemilihan produk hingga pembayaran.	0,604	0,300	0,000	Valid
6	Saya merekomendasikan rekan kerja lain untuk memaksimalkan <i>e-purchasing</i>	0,393	0,300	0,000	Valid
7	Tim LPSE Kabupaten Bireuen sigap dalam membantu kendala teknis <i>e-purchasing</i>	0,445	0,300	0,000	Valid
8	Transaksi di <i>e-katalog</i> tercatat dengan baik dan transparan	0,638	0,300	0,000	Valid
Kebijakan Internal (X₂)					
Butir	Pernyataan	r-hitung	r-min	Sig. Uji	Ket
1	Pemerintah Kabupaten Bireuen secara rutin memberikan pelatihan (Bimtek) teknis penggunaan <i>e-purchasing</i> kepada pegawai	0,651	0,300	0,000	Valid
2	Terdapat kebijakan insentif/tunjangan khusus bagi pengelola pengadaan yang berkinerja baik dalam penggunaan <i>e-purchasing</i>	0,695	0,300	0,000	Valid
3	Ada pengakuan (<i>reward</i>) dari pimpinan atas kecepatan dan ketepatan penggunaan <i>e-katalog</i>	0,366	0,300	0,000	Valid
4	Pimpinan/Kepala Dinas di lingkungan Bireuen sangat mendukung kebijakan pembelian melalui <i>e-purchasing</i>	0,620	0,300	0,000	Valid
5	Pemerintahan Kabupaten Bireuen telah mengeluarkan Surat Edaran/Perbup yang mewajibkan penggunaan <i>e-purchasing</i> jika barang/jasa tersedia di <i>e-katalog</i> Elektronik	0,660	0,300	0,000	Valid
6	Pejabat pengadaan di SKPD kami secara proaktif mencari produk di <i>e-katalog</i> sebelum melakukan metode pengadaan lain	0,469	0,300	0,000	Valid
7	Metode <i>e-purchasing</i> meningkatkan transparansi harga dibandingkan metode konvensional	0,676	0,300	0,000	Valid
8	Saya lebih memilih menggunakan <i>e-purchasing</i> dibandingkan pengadaan langsung manual	0,710	0,300	0,000	Valid
9	Saya rutin memeriksa SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)	0,770	0,300	0,000	Valid

	sebelum melakukan pemesanan				
10	Saya aktif melakukan negosiasi harga pada aplikasi <i>e-purchasing</i> untuk efisiensi anggaran	0,749	0,300	0,000	Valid
11	Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki regulasi yang mewajibkan penerapan K3 dalam proses <i>e-purchasing</i>	0,419	0,300	0,000	Valid
12	Sistem LPSE/E-catalogue sudah memberikan rasa aman dan mengurangi risiko kesalahan manusia (<i>human error</i>)	0,358	0,300	0,000	Valid
Komitmen (X₃)					
Butir	Pernyataan	r-hitung	r-min	Sig. Uji	Ket
1	Saya menggunakan <i>e-purchasing</i> bukan karena paksaan, melainkan karena saya percaya pada manfaatnya	0,408	0,300	0,000	Valid
2	Saya merasa <i>e-purchasing</i> sejalan dengan tujuan pribadi saya untuk bekerja secara jujur dan transparan	0,520	0,300	0,000	Valid
3	Saya bersedia meluangkan waktu untuk mempelajari fitur-fitur baru di <i>e-purchasing</i> agar pekerjaan lebih efektif	0,558	0,300	0,000	Valid
4	Saya merasa wajib menggunakan <i>e-purchasing</i> karena adanya instruksi dari Pemkab Bireuen/Pusat	0,533	0,300	0,000	Valid
5	Saya akan tetap menggunakan <i>e-purchasing</i> meskipun ada sistem lain yang lebih baru (selama aturannya mewajibkan)	0,557	0,300	0,000	Valid
6	Saya merasa bertanggung jawab moral untuk mendukung transparansi pengadaan melalui <i>e-purchasing</i>	0,534	0,300	0,000	Valid
Efektivitas (Y)					
Butir	Pernyataan	r-hitung	r-min	Sig. Uji	Ket
1	Saya cepat memahami prosedur kerja baru yang diterapkan dalam penggunaan <i>e-purchasing</i> di Pemerintahan Kabupaten Bireuen	0,657	0,300	0,000	Valid
2	Saya bersedia mempelajari keterampilan baru untuk mendukung tugas-tugas saya	0,447	0,300	0,000	Valid
3	Sistem <i>e-purchasing</i> mudah diakses dan digunakan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kabupaten Bireuen	0,400	0,300	0,000	Valid
4	Penggunaan <i>e-purchasing</i> membantu meningkatkan kecepatan saya dalam menyelesaikan proses pengadaan	0,594	0,300	0,000	Valid
5	Secara keseluruhan, saya puas dengan kinerja aplikasi <i>e-purchasing</i>	0,649	0,300	0,000	Valid
6	<i>E-purchasing</i> memudahkan saya dalam mendapatkan spesifikasi barang yang dibutuhkan	0,409	0,300	0,000	Valid

Dari hasil perhitungan validitas variabel, hasil r-hitung dibandingkan dengan r-min = 0,300, maka tampak hasilnya semua valid dan juga dibuktikan dari nilai signifikansinya, sehingga semua butir pengukur variabel dinyatakan dapat digunakan dalam penelitian ini.

c). Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan alat ukur yang dipakai. Alat ukur dapat dikatakan *reliable* (dapat dipercaya), bila hasil pengukurannya tetap atau nilai yang diperoleh konsisten, walaupun dilakukan pengukuran ulang pada subyek yang sama (Sugiono, 2016). Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item/pertanyaan yang dipergunakan pada penelitian ini akan menggunakan formula *Cronbach Alpha* (α), dimana secara umum dianggap reliabel apabila nilai $\alpha > 0,65$, jika Nilai koefisien reliabilitas yang baik adalah diatas 0,7 (cukup baik), di atas 0,8 (baik). Hasil uji reliabilitas semua variabel ditunjukkan pada lampiran dengan hasil dalam tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
Kompetensi	0,733	8	<i>Realible</i>
Kebijakan Internal	0,659	12	<i>Realible</i>
Komitmen	0,755	6	<i>Realible</i>
Efektivitas	0,745	6	<i>Realible</i>

(c) Uji Asumsi Klasik

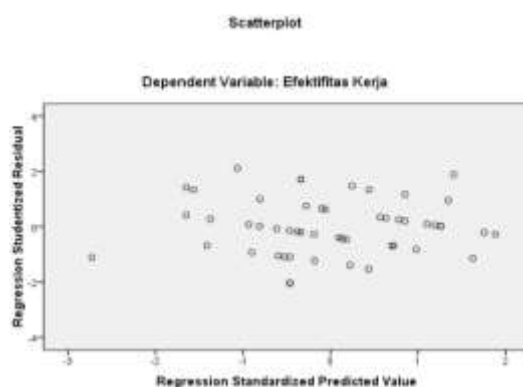
Untuk pengujian normalitas data dalam penelitian ini dideteksi melalui uji non parametrik yakni uji Kolmogorov-Smirnov yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

		Studentized Deleted Residual
N		51
Normal Parameters ^a	Mean	.0020897
	Std. Deviation	1.02513387
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		.557
Asymp. Sig. (2-tailed)		.116

Hasil dari nilai Asymp. Sig (dua pihak) diketahui nilainya 0,116 yakni diatas taraf uji 5%, maka sesuai ketentuan uji ini disimpulkan data berdistribusi normal, sehingga asumsi ini dipenuhi.

Kemudian, dilakukan deteksi heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan analisa grafis, dimana jika terdapat pola tertentu pada *scatterplot* maka terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola pada *scatterplot*, hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.berikut :



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Dari gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (random) serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan layak dipakai.

Lalu Uji heteroskedastisitas, yang diperoleh hasilnya pada gambar 3. Berdasarkan *grafik Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dan kemudian dilakukan uji Multikolinearitas, dengan hasil yakni:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi	.936	1.068
Kebijakan Internal	.771	1.297
Komitmen	.738	1.354

a. Dependent Variable: efektivitas kerja

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai tolerance semua diatas 0,10 dan VIF uji dibawah 10,00 sehingga dinyatakan asumsi Multikolinieritas dinyatakan dicapai yakni tidak terjadi gangguan Multikolinieritas.

2) Hasil Analisis Jalur

(a). Uji Model Secara Simultan

Data penelitian terhadap 51 orang Kepala SKPK pada Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan instrument yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. Hasil data hasil penskalaan dalam skala interval ditunjukkan dalam lampiran penelitian. Dalam penelitian ini model analisis dengan analisis jalur yang menentukan pengaruh variabel kompetensi (X_1), kebijakan internal (X_2) dan komitmen (X_3) terhadap efektivitas (Y) dengan model jalur : $Y = \rho_1 X_1 + \rho_2 X_2 + \rho_3 X_3 + e$. Adapun pembuktian hipotesis secara simultan (keseluruhan) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Uji Model Analisis Secara Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	11.591	3	3.864	33.343	.000 ^a
Residual	54.330	47	1.156		
Total	65.922	50			

a. Predictors: (Constant), Komitmen, Kompetensi, Kebijakan Internal

b. Dependent Variable: Efektifitas Kerja

Berdasarkan hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar 33,343 sementara nilai F_{tabel} untuk jumlah responden sebanyak 51 orang pada tingkat signifikansi (α) = 5% yaitu sebesar 2,57. Hal ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa probabilitas kesalahan kurang dari 5% maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti bahwa variabel kompetensi (X_1), kebijakan internal (X_2) dan komitmen (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan (Y) *e-purchasing* pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

(b). Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Langkah selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis dalam permasalahan penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan menentukan pengaruh langsung dan tidak langsung. Pertama dilakukan taksiran nilai kausalitas antar variabel eksogen (X_1 , X_2 , X_3) yang hasilnya disajikan dalam lampiran penelitian.

Tabel 8. Hubungan Kausal Antar Variabel Bebas (Eksogenus)

		Kompetensi	Kebijakan Internal	Komitmen
Kompetensi	Pearson Correlation	1	.747	.751
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	51	51	51
Kebijakan Internal	Pearson Correlation	.747	1	.478**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	51	51	51

Dari tabel 8, diketahui hubungan antar variabel sebagai berikut :

- Hubungan kausal antar variabel kompetensi (X_1) dan kebijakan internal (X_2) sebesar 0,747 masuk kategori kuat.
- Hubungan kausal antar variabel kebijakan internal (X_2) dan komitmen (X_3) sebesar 0,478 masuk kategori sedang
- Hubungan kausal antar variabel komitmen (X_3) dan kompetensi (X_1) sebesar 0,751 masuk kategori kuat.

Lalu ditaksir nilai koefisien jalur antar variabel eksogen (X_1 , X_2 , X_3) terhadap variabel endogen (Y), dengan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 9. Taksiran Koefisien Jalur

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	34.435	4.954		6.951	.000
Kompetensi	.197	.119	.477	4.657	.000
Kebijakan Internal	.135	.171	.417	3.903	.000
Komitmen	.300	.136	.411	3.207	.000

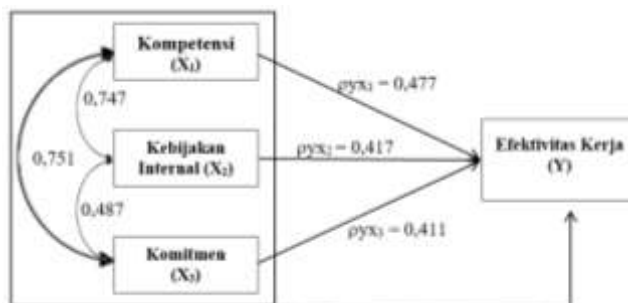
a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja

Maka terdapat hubungan antar variabel eksogen (kompetensi, kebijakan internal dan komitmen). Sedangkan dalam tabel 9, diketahui nilai taksiran koefisien jalurnya, sehingga dapat dijelaskan bahwa taksiran koefisien jalur sebagai berikut :

- Hasil koefisien jalurnya $\rho_{yx1} = 0,477$ hasil perhitungan uji signifikansi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,657 sedangkan t_{tabel} pada taraf uji 5% adalah 2,01. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,657 > 2,01$). Sehingga variabel kompetensi (X_1) berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan (Y) *e-purchasing* pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen pada taraf signifikan 5%.
- Hasil koefisien jalurnya $\rho_{yx2} = 0,417$ hasil perhitungan uji signifikansi, artinya variabel kebijakan internal (X_2) berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan (Y) *e-purchasing* pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
- Hasil koefisien jalurnya $\rho_{yx3} = 0,411$ hasil perhitungan uji signifikansi, artinya variabel komitmen (X_3) berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan (Y) *e-purchasing* pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

(c). Perhitungan Pengaruh Variabel Eksogen (X) terhadap Endogen (Y)

Untuk menentukan pengaruh setiap variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model jalur, maka di rancang bentuk diagram jalurnya, yakni:



Gambar 3. Diagram Jalur Penelitian

(1). Pengaruh Kompetensi Terhadap Efektivitas Penggunaan *E-purchasing*

Besarnya pengaruh langsung kompetensi (X_1) terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* (Y), dinyatakan dengan besaran koefisien jalur ($\rho_{yx1} = 0,477$), Sehingga besarnya pengaruh langsung ini adalah: $(0,477)^2 \times 100\% = 22,75\%$

Besarnya pengaruh tidak langsung kompetensi karena adanya hubungan kausal dengan variabel kebijakan internal dan komitmen dinyatakan:

- Pengaruh kompetensi melalui kebijakan internal terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing*, adalah $= (0,477)(0,747)(0,417) \times 100\% = 16,41\%$. Dan pengaruh kompetensi melalui komitmen sebesar $(0,477)(0,751)(0,411) \times 100\% = 16,39\%$.
- Berdasarkan pengaruh langsung dan tidak langsung, maka dapat dihitung besarnya pengaruh total kompetensi terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* sebesar 55,55%.

(2). Pengaruh Kebijakan Internal Terhadap Efektivitas Penggunaan *E-purchasing*

Besarnya pengaruh langsung kebijakan internal terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing*, dinyatakan dengan besaran koefisien jalur ($\rho_{yx2} = 0,417$), Sehingga besarnya pengaruh langsung ini adalah: $(0,417)^2 \times 100\% = 17,38\%$

Besarnya pengaruh tak langsung kebijakan internal melalui variabel kompetensi dan komitmen dinyatakan:

- Pengaruh kebijakan internal melalui kompetensi terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing*, sebesar $(0,417)(0,487)(0,477) \times 100\% = 13,81\%$. Dan pengaruh kebijakan internal melalui komitmen sebesar $(0,417)(0,751)(0,411) \times 100\% = 15,79\%$.
- Berdasarkan pengaruh langsung dan tidak langsung, maka dapat dihitung besarnya pengaruh total kebijakan internal terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* sebesar 46,28%.

(3). Pengaruh Komitmen Terhadap Efektivitas Penggunaan *E-purchasing*

Besarnya pengaruh langsung komitmen terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing*, dinyatakan dengan besaran koefisien jalur ($\rho_{yx3} = 0,411$), Sehingga besarnya pengaruh langsung ini adalah: $(0,411)^2 \times 100\% = 16,89\%$

Besarnya pengaruh tak langsung komitmen terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing*, karena adanya hubungan komitmen dengan variabel Kompetensi dan kebijakan internal dinyatakan:

- Pengaruh komitmen melalui kompetensi terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* sebesar $(0,411)(0,487)(0,477) \times 100\% = 13,75\%$. Dan pengaruh komitmen melalui kebijakan internal sebesar $(0,411)(0,747)(0,417) \times 100\% = 15,75\%$.
- Sehingga total pengaruh komitmen terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* sebesar 46,39%.

(d). Koefisien Determinasi

Selain menguji koefisien regresi, penelitian ini juga menguji koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2). dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 10. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Jalur	.919 ^a	.876	1.123	1.075

a. Predictors: (Constant), Komitmen, Kompetensi, Kebijakan Internal

b. Dependent Variable: Efektifitas Kerja

Hasil analisis koefisien korelasi secara simultans kompetensi, kebijakan internal dan komitmen terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Bireuen diperoleh R sebesar 0,919 menjelaskan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, memiliki keeratan, dan berhubungan secara linier, dengan derajat hubungannya sebesar 0,919.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,876 menjelaskan bahwa kontribusi faktor kompetensi, kebijakan internal dan komitmen terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar 87,6%.

3). Pembahasan

Hasil analisis data, ditemukan bahwa kompetensi, baik langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan internal dan komitmen mempengaruhi efektivitas penggunaan *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar 55,55%. Sedangkan faktor kebijakan internal sebesar 46,28%, dan komitmen SKPK sebesar 46,39%.

kompetensi pegawai merupakan faktor determinan dalam efektivitas penggunaan *e-purchasing*, sekaligus menjadi fokus utama bagi kebijakan pengembangan sumber daya manusia di sektor publik. Dalam era digitalisasi bisnis saat ini, sistem *e-purchasing* menjadi salah satu alat strategis yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa. *E-purchasing* memungkinkan organisasi untuk melakukan pembelian secara elektronik, meminimalkan kesalahan manusia, mengurangi waktu proses, serta meningkatkan transparansi transaksi. Namun, efektivitas

penggunaan *e-purchasing* tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh kompetensi pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut. Kompetensi menjadi faktor kunci yang memengaruhi kemampuan individu untuk memanfaatkan sistem *e-purchasing* secara optimal. Dengan meningkatkan kompetensi penggunaan sistem *e-purchasing* dapat memaksimalkan potensi *e-purchasing* untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pengadaan.

Rustiarini dkk (2019) menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten dan profesional untuk dapat mengerjakan urusan pemerintah dengan baik. Untuk mendapatkan sumber daya yang efektif, pejabat pengadaan harus berpartisipasi dalam pendidikan dan program pelatihan khusus.

Juga, optimalisasi efektivitas *e-purchasing* tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kombinasi faktor-faktor lain yang saling mendukung. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kebijakan internal merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penggunaan *e-purchasing*, dan perbaikan atau penyelarasan kebijakan dapat menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan kinerja sistem pengadaan elektronik.

Kebijakan internal yang jelas, tegas, dan konsisten berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan *e-purchasing*. Perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh pengguna memahami kebijakan yang berlaku, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, sistem *e-purchasing* dapat mendukung efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Robbins dan Coulter (2017) menyatakan bahwa kebijakan internal perusahaan adalah pedoman formal yang mengarahkan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks *e-purchasing*, kebijakan internal membantu memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai prosedur, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi.

Sedangkan faktor komitmen memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* di Pemerintah Kabupaten Bireuen. Tingkat pengaruhnya yang menunjukkan bahwa hampir setengah dari efektivitas penggunaan *e-purchasing* dapat dijelaskan oleh tingkat komitmen pegawai terhadap penerapan sistem. Menurut Hidayat (2021) bahwa peran Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen mendukung Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menurut peneliti komitmen pegawai mencakup kesediaan untuk mengikuti prosedur *e-purchasing*, konsistensi dalam penggunaan sistem, serta loyalitas terhadap peraturan dan tujuan organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih disiplin, proaktif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses pengadaan melalui sistem *e-purchasing*, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional.

Simpanan (Conclusion)

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan berikut ini:

- 1) Hasil analisis data, membuktikan ada pengaruh langsung dan tidak langsung, kompetensi terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* sebesar 55,55%.
- 2) Terdapat pengaruh kebijakan internal terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing*, baik secara langsung dan tidak langsung, sebesar 46,28%.
- 3) Terdapat pengaruh komitmen terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* baik secara langsung dan tidak langsung, sebesar 46,39%.
- 4) Kontribusi faktor kompetensi, kebijakan internal dan komitmen terhadap efektivitas penggunaan *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar 87,6%.

Daftar Pustaka (References)

- 1) Achmad Nurmandi & Sunhyuk Kim (2015). Making e-procurement work in a decentralized procurement system", *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 28 Iss 3 pp. 198- 220
- 2) Agustino, Leo (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- 3) Coulter, Robbins. (2017). *Manajemen* Jilid 2 Edisi 13. Jakarta: Erlangga
- 4) Edison, Emron, Anwar Yohny, & Komariyah Imas (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke-2, Bandung: Alfabeta

- 5) Hidayat, N. M. (2021). *Peran Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa*. Jogjakarta: Kemenkumham RI Kanwil Jogja. Retrieved from <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/peran-kompetensi-pejabat-pembuat-komitmen-terhadap-kinerja-pengelolaan-pengadaan-barang-jasa>
- 6) Madiistriyatno, H & Hadiwijaya, D. (2020). *Generasi Millennial: Tantangan membangun komitmen kerja/bisnis dan adversity quotient (AQ)*. Tangerang: Indigo Media.
- 7) Marwan Effendi (2016). *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta
- 8) Marwan, Win Konadi, Alfi Syahrin, Kamaruddin, Rahmat (2023). *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Methode dilengkapi analisis data dengan SPSS*, Banda Aceh: Bandar Publishing. ISBN: 978-623-449-205-7
- 9) Marwan Hamid, Ibrahim Sufi, Win Konadi, dan Yusrizal Akmal (2019). *Analisis Jalur Dan Aplikasi SPSS v-25*, Edisi Pertama, Medan: Sefa Bumi Persada.
- 10) Nawi, M. N., Deraman, R., Bamgbade, J. A., Zulhumadi, F., & Riazi, S. R. (2016). E-Procurement in Malaysian Construction Industry: Benefits and Challenges in Implementation. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- 11) Norawati S. dan Fahraini (2022). *Determinan Komitmen Dan Kinerja Karyawan Pada Badan Usaha Milik Daerah BUMD*, Penerbit Adab Manajemen Ma.
- 12) Richard M. Steers (2002). Pengaruh komitmen, Partisipasi, dan Attitude, terhadap Kinerja Manajerial studi kasus pada pemerintah daerah kota Sukabumi. *Jurnal Ekonomak*, 8(2), 48–60.
- 13) Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge (2009). *Organizational Behavior*. 13. Three Edition, USA: Pearson International Edition, Prentice -Hall.
- 14) Robbins SP, dan Judge (2016). *Perilaku Organisasi*. Selemba Empat. Jakarta.
- 15) Rustiari, N. W., Sutrisno, Nurkholis, & Andayani, W. (2019). Why People Commit Public Procurement Fraud? The Fraud Diamond View. *Journal of Public Procurement*, 1-17.
- 16) Sedarmayanti (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika. Aditama.
- 17) Siswanto, I. (2022). *Monograf Komitmen Organisasi: Upaya Membangun Komitmen Organisasi Pendidikan Melalui Gaya Kepemimpinan, Kepribadian dan Kepuasan Kerja*. CV. DOTPLUS Publisher.
- 18) Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- 19) Tarigan, A. P. (2019). *Pengaruh E-Procurement dan Kompetensi Pegawai terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada Kementerian Keuangan Tahun 2019)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie.
- 20) Wibowo (2017). *Manajemen Perubahan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 21) Zusrony, E. (2021). *Kinerja Pegawai Bank Syariah Ditinjau Dari Aspek Motivasi Kerja, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-62